



PERAN DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA DALAM UPAYA MEMBANTU FIJI MENGHADAPI TANTANGAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Liza Faizah Rizqiah^{*1}, Agussalim Burhanuddin²

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: lizafaizah2@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Desember 2023</p> <p>Revised : 14 Januari 2024</p> <p>Accepted : 02 Februari 2024</p> <p>Publication : 29 Februari 2024</p> <p>Keywords: <i>Role, Education, Social Change</i></p> <p>Kata Kunci: Peran, Pendidikan, Perubahan Sosial</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This research focuses on analysing the Fiji government's policies and efforts in dealing with environmental security threats after receiving diplomacy from the Indonesian parliament. Using desk research method, this study collects and analyses data to assess the effectiveness of Indonesian parliamentary diplomacy. The result of the study is that parliamentary diplomacy, as one of the components of multi-track diplomacy, plays an important role in post-Cold War international relations. Parliaments, including DPR RI, play an active role in bilateral and international cooperation to advance national interests and ensure the implementation of international agreements. Indonesia also initiated regional co-operation through IPPP, which highlights the importance of marine resource sustainability and mitigating the impacts of climate change. Fiji's national policies, such as the Republic of Fiji National Climate Change Policy, reflect agreements reached in IPPP meetings, demonstrating the significant impact of parliamentary diplomacy in Fiji's environmental policies.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan upaya pemerintah Fiji dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan setelah menerima diplomasi dari parlemen Indonesia. Menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai efektivitas diplomasi parlemen Indonesia. Hasil penelitian adalah Diplomasi parlemen, sebagai salah satu komponen multi-track diplomacy, memainkan peran penting dalam hubungan internasional pasca Perang Dingin. Parlemen, termasuk DPR RI, berperan aktif dalam kerjasama bilateral dan internasional untuk memajukan kepentingan nasional dan memastikan implementasi kesepakatan internasional. Indonesia juga menginisiasi kerjasama regional melalui IPPP, yang menyoroti pentingnya keberlanjutan sumber daya laut dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kebijakan nasional Fiji, seperti Republic of Fiji National Climate Change Policy, mencerminkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan IPPP, menunjukkan dampak signifikan dari diplomasi parlemen dalam kebijakan lingkungan Fiji.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan konektivitas dan kompleksitas tantangan global, diplomasi tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab eksklusif pemerintah pusat melalui kementerian luar negeri. Diplomasi *multi-track* atau multi-jalur, yang melibatkan aktor-aktor non-negara seperti parlemen, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, terus mengalami perkembangan. Di antara berbagai aktor diplomasi tersebut, diplomasi parlemen menonjol sebagai mekanisme penting untuk memajukan kepentingan nasional, memperkuat hubungan bilateral, dan mendukung kerjasama internasional dalam berbagai isu strategis, termasuk keamanan lingkungan.

DPR RI sebagai representasi parlemen Indonesia aktif berpartisipasi dalam diplomasi parlemen, khususnya di wilayah Asia-Pasifik. Melalui berbagai inisiatif diplomatik, DPR RI tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga mendorong kerjasama regional yang berfokus pada isu-isu kritis seperti manajemen bencana dan perubahan iklim. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Fiji. Sebagai negara kepulauan di Pasifik Selatan, Fiji menghadapi tantangan signifikan terkait keamanan lingkungan, yang mencakup bencana alam seperti siklon tropis dan dampak jangka panjang dari perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut.

Fiji sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, telah menjadi salah satu partner diplomatik parlemen Indonesia. Kerjasama ini mencerminkan komitmen DPR RI untuk mendukung negara-negara sahabat dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan upaya pemerintah Fiji dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan, dengan menyoroti peran dan kontribusi diplomasi parlemen Indonesia. Melalui metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai efektivitas diplomasi parlemen Indonesia dalam mendukung kebijakan lingkungan Fiji.

Diplomasi parlemen sebagai komponen penting dari *multi-track diplomacy*, menunjukkan bagaimana kerjasama internasional dapat diperkuat melalui partisipasi aktif parlemen dalam forum-forum internasional seperti *Asia-Pacific Parliamentary Forum* (APPF) dan *Inter-Parliamentary Union* (IPU). DPR RI dengan keterlibatan aktifnya dalam forum-forum tersebut, memainkan peran penting dalam memajukan agenda lingkungan dan perubahan iklim di tingkat regional dan global. Melalui inisiatif

seperti *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP), DPR RI berhasil menginisiasi kerjasama regional yang menyoroti pentingnya keberlanjutan sumber daya laut dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas diplomasi parlemen Indonesia dalam mendukung kebijakan keamanan lingkungan di Fiji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan baru mengenai peran diplomasi parlemen dalam konteks kerjasama internasional dan kontribusinya terhadap penanganan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

METHOD

Penelitian akan dilakukan berbasis data. Data akan diambil melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) untuk mempelajari literatur tertulis yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam Jurnal ini. Fokus utama penelitian adalah analisis data terkait kebijakan atau upaya yang dilakukan pemerintah Fiji untuk menghadapi ancaman keamanan lingkungan setelah parlemen Indonesia melakukan diplomasi.

Berbagai jenis data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menilai keberhasilan dari upaya diplomatik parlemen Indonesia. Keberhasilan yang dimaksud adalah bentuk implementasi dari substansi yang ditawarkan dalam proses diplomasi parlemen dalam kebijakan atau upaya pemerintah Fiji dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan.

Pengolahan data akan dilakukan menggunakan teknik Induksi dan Deduksi. Melalui metode induksi, data-data khusus yang ditemukan akan diolah untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum. Data-data umum yang ditemukan kemudian akan diolah dengan metode deduksi, yaitu dengan pembahasan untuk mencapai kesimpulan yang khusus.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil

Konsep Diplomasi Parlemen

Diplomasi Parlemen

Terminologi “Diplomasi Parlemen” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1889 sejak didirikannya IPU (Inter-Parliamentary Union) yang merupakan organisasi

parlemen internasional pertama. Perancis yang merupakan salah satu pendiri organisasi ini sangat aktif mengkampanyekan terminologi tersebut. (Nainggolan, 2020)

Perkembangan hubungan internasional pasca perang dingin menunjukkan perkembangan keberagaman pelaku diplomasi. Parlemen merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang belum banyak dikaji dan diperhatikan perannya. Dalam skema *multi track diplomacy* atau diplomasi multi jalur, parlemen dan anggotanya merupakan bagian dari pelaku diplomasi jalur dua (*second track diplomacy*), untuk membedakannya dari para diplomat kementerian luar negeri yang berada pada *first track diplomacy* (diplomasi jalur satu), dan lembaga non-pemerintah, kalangan bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di jalur tiga dan empat dalam *multi track diplomacy* (Nainggolan, 2020). Pemerintah sebagai lembaga eksekutif tentu memiliki dan memainkan peran setral dalam pelaksanaan politik luar negeri, namun aktor-aktor lain yang tergabung dalam *multri track diplomacy* juga memerankan peran penting dalam hubungan luar negeri yang dijalankan pemerintah. Pemerintah ingin mendorong pelaksanaan *total diplomacy* yang melibatkan semua unsur atau komponen bangsa.

Sebagai mitra kerja pemerintah dalam pengelolaan hubungan luar negeri, parlemen berperan dalam membina hubungan dengan parlemen negara sahabat dan mengoptimalkan kepentingan nasional. Selain itu, parlemen juga bertugas memastikan berjalannya kerjasama internasional yang disepakati oleh pemerintah dengan negara atau organisasi antar pemerintah. Kesepakatan tertentu perlu diratifikasi atau diterjemahkan menjadi kebijakan nasional oleh parlemen untuk selanjutnya dapat diimplementasikan secara maksimal. Disinilah parlemen berperan dalam hubungan kerjasama luar negeri, dengan memastikan implementasi kesepakatan antar negara.

Diplomasi parlemen memiliki dua ciri khas, pertama proses pengambilan keputusan di sidang-sidang parlemen internasional sangat demokratis. Tidak ada pihak yang memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB. Keputusan yang diambil lebih banyak berdasarkan konsensus dan bila terjadi voting, seperti yang sering terjadi di sidang-sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, delegasi suatu parlemen suatu negara tidak diwajibkan untuk memberikan satu suara yang sama. Delegasi dapat membagi suaranya menjadi sebagian setuju, sebagian tidak setuju, dan sebagian lainnya abstain. Hal ini dimungkinkan karena parlemen multilateral mengakomodasi perbedaan sikap di antara fraksi-fraksi parlemen dalam satu negara. Ciri khas kedua yaitu terkait dengan tabiat dari parlemen yang lebih dinamis dan transparan. Dalam diskusi dan

perdebatan di forum-forum internasional, di saat eksekutif sering kali harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan posisinya dengan membungkus isu yang dinegosiasikan dalam formalitas yang berkepanjangan, proses diplomasi yang dilakukan parlemen umumnya lebih langsung dan terbuka. (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2019)

Parlemen Indonesia yaitu DPR RI sendiri tercatat telah memiliki 102 *Friendship Group* atau Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) per 2024 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2019). DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) tidak hanya berperan aktif dalam organisais Parlemen Internasional, tetapi juga aktif dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat teknis regional dan multilateral, serta pertemuan-pertemuan khusus yang membahas isu-isu kontemporer untuk mendukung kepentingan nasional dan posisi Indonesia di level internasional.

Diplomasi Parlemen DPR RI di Bidang Lingkungan

DPR RI sebagai aktor utama dalam diplomasi parlemen Indonesia menaruh perhatian penuh pada manajemen bencana yang efektif. Dalam sidang tahunan *Asia-Pacific Parliamentary Forum* (APPF) ke-15 di Moskow pada tahun 2007, delegasi DPR RI menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat beserta hak miliknya dari bencana alam. Dalam sidang tersebut, delegasi DPR RI juga mendorong kerjasama regional dan internasional dalam upaya menjamin kesiap-siagaan menghadapi bencana maupun membntu negara-negara korban bencana dalam menanggulangi korban jiwa, kerugian ekonomi, serta kerusakan aset lingkungan global. Sidang ini kemudian menghasilkan resolusi yang disponsori oleh Indonesia dan Rusia yaitu “*Cooperation in Disaster Management and Emergency Response*” (Tim BKSAP DPR RI, 2009).

DPR RI juga mendukung sepenuhnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, terutama prinsip *common but differentiated responsibilities* yang mendorong pemenuhan kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Selain itu, DPR RI juga menyambut baik pelaksanaan *Clean Development Mechanism* (CDM). Dalam mendorong partisipasi aktif setiap parlemen di dunia untuk mendukung implementasi Protoko; Kyoto, maka melalu9i kesempatan pemaparannya di Sidang ke-116 IPU di Bali pada Mei 2007, delegasi DPR RI mengajak seluruh parlemen negara-negara anggota IPU untuk mengedepankan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan

Protokol Kyoto. DPR RI juga menghimbau parlemen negara-negara anggota IPU untuk memkasimalkan upaya mereka dalam meningkatkan dan mengutamakan legislasi peraturan nasional tentang lingkungan yang tidak hanya terbatas pada Protokol Kyoto tetapi juga terhadap *Convention on Biological Diversity* dan *Convention to Combat Desertification* serta konvensi-konvensi lainnya sebagai langkah awal menuju etika baru dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Di kancah regional, DPR RI telah menyelenggarakan IPPP (Indo-Pacific Parliamentary Partnership) pada 2018. Konferensi ini merupakan kali pertama Parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan Parlemen dari negara-negara di Pasifik, atas dasar kesamaan tantangan geografis yang dihadapi seluruh negara yang terlibat. Dari diskusi yang dilakukan, tercapai beberapa kesimpulan diantaranya yaitu komitmen untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut, meningkatkan kepedulian terhadap pencemaran laut, dan kolaborasi untuk mengurangi sampah laut. Selain itu, dibahas juga dampak dari perubahan iklim bagi negara berkembang, sehingga diskusi menghasilkan desakan bagi seluruh peserta untuk mengimplementasikan hukum internasional di bidang perubahan iklim dan lingkungan.

Tantangan Keamanan Lingkungan di Fiji

Gambaran Umum tentang Keadaan Lingkungan di Fiji

Fiji merupakan sebuah negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan dengan populasi sebanyak 941,867. Negara ini memiliki luas 18.000km² yang tersebar di 322 pulau, dan sekitar 110 diantaranya berpenghuni. Sebagian besar penduduknya tinggal di dua pulau besar yaitu Viti Levu dan Vanua Levu. Fiji menghadapi tanyangan pembangunan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi di Fiji relatif lambat dalam beberapa dekade terakhir. Tantangan alam dan perubahan iklim merupakan tantangan utama yang dihadapi Fiji. Siklon Tropis Winston yang terjadi pada 2016 merupakan salah satu contoh tantangan alam yang dihadapi Fiji, dimana bencana ini menyebabkan kerusakan sebesar 2 Miliar Dollar Fiji atau setara dengan 20% dari PDB Fiji.

Rata-rata kerugian aset akibat siklon tropis dan banjir di Fiji mencapai lebih dari 500 juta Dollar Fiji pert tahun, lebih dari 5% dari PDB Fiji. Kerugian yang jauh lebih besar bisa dialami Fiji setelah kejadian yang lebih jarang terjadi, misalnya banjir fluvial 100 tahunan yang dapat menyebabkan kerugian aset sebesar lebih dari 2 Miliar Dollar Fiji (Climate Vulnerability Assessment- Making Fiji Climate Resilient, 2017).

Biaya penanganan bencana yang disebabkan oleh bahaya alam kemungkinan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Tantangan ini diproyeksikan akan terus meningkat didorong oleh tren sosio-ekonomi seperti meningkatnya urbanisasi dan pembangunan di sepanjang garis pantai, serta perubahan iklim. Selain itu, dampak paralel dari perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, pengsamakan laut, peningkatan resiko banjir, atau penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor ke daerah baru juga dapat mempengaruhi hasil dan pilihan pembangunan ekonomi di Fiji.

Tantangan Utama yang Dihadapi Fiji dalam Hal Keamanan Lingkungan

Berdasarkan laporan ketahanan sosial dari *World Bank Unbreakable Report*, Fiji berada di peringkat ke-71 dari 117 negara, dengan indikator ketahanan sosial sebesar 56%. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan indikator kemampuan penduduk untuk mengatasi dan pulih dari kerugian akibat bencana, ketahanan Fiji diperkuat dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, tingkat inklusi keuangan yang tinggi, dan sistem perlindungan sosial yang kuat.

Namun, tantangan alam dan bencana seperti siklon tropis dan banjir telah mengakibatkan rata-rata 25.700 orang terjerumus dalam kemiskinan setiap tahun di Fiji. Bencana-bencana langka bahkan bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar, misalnya jenis siklon tropis yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun akan menjerumuskan hampir 50.000 warga Fiji atau sekitar 5% dari total populasi ke dalam kemiskinan. Perubahan iklim akan memperbesar bahaya dan tantangan alam di negara ini. Masa depan siklon tropis sangat tidak pasti, namun diprediksi akan terjadi peningkatan proporsi badai berintensitas tinggi dan kerugian akibat gelombang badai akan meningkat. (Climate Vulnerability Assessment- Making Fiji Climate Resilient, 2017)

Siklon tropis ditandai dengan angin yang merusak, hujan, dan gelombang badai. Bencana ini telah menjadi bahaya iklim yang paling serius bagi Fiji dalam hal kerusakan dan kerugian total. Siklon tropis memberikan dampak yang paling signifikan di daerah pantai, tetapi sebagai negara kepulauan, Fiji dapat terkena dampak hingga ke seluruh wilayahnya. Fiji mengalami rata-rata satu siklon per tahun. Beberapa siklon tropis yang berdampak paling buruk di Fiji adalah Siklon Tropis Wintson (kategori 5); Siklon Tropis Kina (Kategori 4, 1993); Siklon Tropis Ami (kategori 3, 2003); dan Siklon Tropis Evan (kategori 4, 2012). Siklon Tropis Kina dan Ami menyebabkan

banjir yang meluas tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur, peternakan, dan pertanian.

Siklon Tropis Kina mengakibatkan hilangnya 23 nyawa dan kerusakan sebesar 170 juta Dollar Fiji . Sebanyak 17 nyawa melayang di Siklon Tropis Ami, dengan kerugian lebih dari 100 juta Dollar Fiji. Siklon Tropis Evan berdampak pada Vanua Levu bagian utara dan Viti Levu bagian barat, menyebabkan kerugian yang sangat besar pada perumahan, infrastruktur, mata pencaharian, dan tanaman, dengan total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai 194 juta Dollar Fiji.

Pada tahun 2012, Vunidogoloa menjadi desa pertama yang mulai direlokasi ke tempat yang lebih tinggi karena kenaikan permukaan laut. Tingkat permukaan laut diproyeksikan akan meningkat secara signifikan pada akhir abad ke-21, diprediksikan melebihi 100cm pada tahun 2100. Keadaan ini akan berimplikasi terhadap banjir pesisir, topan badai, gelombang pasang, dan pasang astronomi. PDB yang digunakan untuk penanganan badai tropis dan banjir diprediksi dapat meningkat hingga 50% pada 2050. Jumlah populasi yang terjerumus ke dalam kemiskinan setiap tahun akibat bencana alam juga diprediksi akan meningkat sebesar 25% (dari 25.700 menjadi 32.400).

Selain bencana alam, perubahan iklim juga membawa ancaman jangka panjang, terutama kenaikan permukaan air laut, dampak kesehatan, dan kerugian dalam sektor pertanian. Dalam jangka panjang, kenaikan permukaan air laut dapat menjadi ancaman besar bagi Fiji, terutama pulau-pulau kecil dengan relief dataran rendah dengan kepadatan penduduk rendah. Puluhan ribu penduduk Fiji tinggal di pulau-pulau kecil dengan relief dataran rendah, lokasi-lokasi ini akan sulit dan mahal untuk dilindungi dari kenaikan permukaan laut dan gelombang badai, yang akan membuat beberapa pemukiman ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, perubahan iklim jangka panjang akan mempengaruhi kesehatan di Pasifik, dengan dampak melalui bencana yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah, penyakit yang ditularkan melalui air (terutama diare), dan penyakit tidak menular yang sensitif terhadap suhu seperti penyakit kardiovaskular dan pernapasan. Masalah kesehatan ini mengancam penduduk Fiji dan akan menantang sistem perawatan kesehatan, dan juga bisa memiliki dampak negatif pada beberapa sektor utama ekonomi, terutama sektor pariwisata, yang sangat rentan terhadap persepsi risiko negatif.

Mengingat efek suhu saja, satu simulasi menunjukkan bahwa perubahan iklim bisa mengurangi pendapatan pariwisata di Fiji sebesar 18 persen pada tahun 2030. Selain itu, beberapa model iklim memproyeksikan penurunan curah hujan rata-rata di Fiji, yang merupakan perhatian khusus, karena 55–65 persen pasokan energinya dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga air. (Climate Vulnerability Assessment-Making Fiji Climate Resilient, 2017)

Sektor pertanian adalah sektor yang penting dan terancam oleh perubahan iklim. Sekitar 64.500 rumah tangga di Fiji memperoleh pendapatan sektor pertanian dan menyumbang sekitar 8% dari PDB. Pendapatan dari sektor pertanian sangat penting bagi masyarakat yang hidup di bawah atau dekat dengan garis kemiskinan. Dengan distribusi pendapatan saat ini, setiap poin presentase penurunan pendapatan pertanian akan berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.000 orang. Perubahan iklim akan mempengaruhi kondisi lingkungan, seperti suhu, curah hujan, kelembaban, ketersediaan air untuk irigasi, dan distribusi hama. Hal ini tentu mempengaruhi hasil pertanian Fiji dan berimbas pada ketahanan ekonomi.

Peran Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Mengatasi Tantangan Keamanan Lingkungan di Fiji

Kerjasama Diplomatik Antara Parlemen Indonesia dan Fiji

Secara umum, Indonesia dan Fiji telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1974. Secara simbolis hubungan ini dimulai dengan penandatanganan Perjanjian antara Duta Besar Indonesia dan Komisioner Tinggi Fiji di Selandia Baru. Hubungan antar dua negara ini telah berlangsung selama 50 tahun dan melibatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan strategi.

Indonesia sejak 2008 rutin mengadakan acara tahunan bersama negara-negara di kawasan Pasifik yang bertema Demokrasi, yaitu Bali Democracy Forum (BDF). Pertemuan tahunan ini bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang progresif di kawasan Asia-Pasifik. BDF berfungsi sebagai platform bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan wawasan yang berkaitan dengan demokrasi, keragaman, dan tata kelola pemerintahan. BDF memainkan peran penting dalam memupuk nilai-nilai demokrasi, mendorong dialog, dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Fiji sendiri telah menjadi peserta dari Forum ini sejak pertama kali didirikan. Forum demokrasi yang diinisiasi oleh Indonesia ini menciptakan kesempatan bagi anggotanya untuk

mendapatkan wawasan mengenai sistem demokrasi dari negara lain di kawasan. Dengan wawasan dan tekad untuk berkolaborasi, Forum ini kemudian menciptakan peluang bagi diplomasi parlemen Indonesia dan Fiji.

Parlemen Indonesia dan Fiji pertama kali membentuk Grup Kerja Sama Bilateral melalui Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* pada September 2017 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan parlemen kedua negara ini masih dalam rangkaian sidang *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals* yang dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 parlemen berbagai negara. MoU tersebut berisikan komitmen kedua negara untuk mempererat kerja sama antarpellemen dalam berbagai bidang. (advertorial, 2017)

Parlemen Indonesia juga melakukan diplomasi di kawasan Pasifik yang melibatkan Fiji melalui *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership*. Hubungan kerja sama yang diinisiasi oleh parlemen Indonesia ini menggelar pertemuan pertamanya pada 23-24 Juli 2018 di Jakarta. Pertemuan pertama ini mengangkat tiga topik diskusi, yaitu :

1. Membangun Kemitraan untuk Pembangunan Masa Depan.
2. Dorongan Parlemen untuk Mempromosikan Potensi Ekonomi Biru untuk Memastikan Pembangunan Sumber Daya Kelautan yang Berkelanjutan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Kekuatan Pendorong Baru Pertumbuhan Ekonomi dalam Kemitraan Indonesia-Pasifik.

Langkah-langkah Konkret yang Dilakukan oleh Parlemen Indonesia

Dalam diplomasi parlemen, hubungan Indonesia dan Fiji dimulai dengan proses yang panjang. Sebelum hubungan bilateral antar parlemen kedua negara dimulai, hubungan diplomasi melalui berbagai level telah tercipta. Hubungan yang terjalin di berbagai level sebelumnya, menciptakan dampak bagi keberlangsungan diplomasi parlemen antar kedua negara.

Hubungan diplomatis yang dibangun oleh Diplomat Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menciptakan atmosfer persahabatan yang baik diantara kedua negara. Upaya Kementerian Luar Negeri melalui *Bali Democracy Forum* untuk menciptakan platform berdiskusi mengenai demokrasi akhirnya juga berpengaruh menciptakan keleluasaan hubungan diplomatik antar parlemen kedua negara.

Secara substansi, parlemen Indonesia sangat aktif mengingatkan dampak perubahan iklim khususnya bagi negara-negara di kawasan pasifik. Melalui *Indonesia-*

Pacific Parliamentary Partnership, parlemen Indonesia berhasil menciptakan pandangan yang searah tentang dampak perubahan iklim. Parlemen Indonesia melakukan pendekatan dalam aspek ekonomi, sehingga luaran atau *output* dari pertemuan ini tidak hanya berupa peringatan dampak dari perubahan iklim tetapi juga strategi ekonomi yang berdampak baik bagi lingkungan dan berkelanjutan.

Pertemuan kerja sama yang diinisiasi oleh Indonesia dan melibatkan negara-negara pasifik ini menghasilkan 9 poin kesimpulan berupa kesamaan dan kesepakatan pandangan. Beberapa poin yang terkait dengan upaya Indonesia untuk membantu menghadapi tantangan keamanan lingkungan yaitu:

1. Seluruh negara (termasuk Fiji) menegaskan keyakinan tentang pentingnya kontinuitas regional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan, mendorong kerja sama dan integrasi regional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara. Seluruh negara yang hadir juga setuju untuk membuka lebih banyak hubungan ekonomi untuk memahami potensi wilayah.
2. Seluruh negara (termasuk Fiji) menyambut baik komitmen Indonesia untuk memberikan dukungan dalam hal bantuan teknis berupa berbagai program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari kerja sama antar parlemen.
3. Seluruh negara (termasuk Fiji) mengakui laut sebagai identitas bersama yang sangat penting bagi masa depan bersama dan kemanusiaan bersama dalam segala keberagamannya. Seluruh negara menegaskan kembali komitmen untuk melestarikan dan menjaga laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai milik bersama secara global. Seluruh negara menyatakan keprihatinan terhadap segala jenis polusi laut, plastik dan plastik mikro, polusi nutrisi, air limbah tanpa pengolahan. Seluruh negara menyerukan tindakan bersama yang dapat mengurangi sampah laut dari kegiatan berbasis lahan.
4. Seluruh negara (termasuk Fiji) menyatakan kekhawatiran terhadap dampak buruk dari perubahan iklim terhadap lautan dan masyarakat di negara berkembang. Seluruh negara menyadari pentingnya Perjanjian Paris dan mendesak seluruh negara peserta untuk mengambil tindakan yang lebih besar dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan isi dari *Paris Agreement* (Perjanjian Paris).
5. Seluruh negara (termasuk Fiji) menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya risiko penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan meskipun ada upaya di seluruh dunia untuk

mempromosikan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, negara peserta berbagi pandangan bahwa penangkapan ikan ilegal, tanpa regulasi, dan tanpa laporan perlu dicegah dan dihilangkan untuk memastikan keberlanjutan laut.

Dampak dan Manfaat dari Upaya Diplomasi Parlemen Indonesia

Parlemen Indonesia secara spesifik melakukan pendekatan ekonomi sebagai langkah penyelesaian masalah untuk tantangan keamanan lingkungan yang dihadapi bersama oleh negara pasifik dalam pertemuan parlemen negara pasifik IPPP pada 2018 lalu. Inisiasi kerja sama ini merupakan sebuah proses diplomasi yang linear antar Indonesia dan negara-negara pasifik, termasuk Fiji. Hubungan Indonesia dan Fiji sendiri yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun tentu mempengaruhi efektivitas diplomasi parlemen Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan demokrasi berdampak baik, dibuktikan dengan terbukanya pemerintah Fiji terhadap diplomasi parlemen yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Kepercayaan yang dibentuk melalui hubungan diplomatik yang panjang juga berdampak baik bagi implementasi resolusi dari *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP).

Setelah parlemen Indonesia berdiplomasi dengan Pemerintah Fiji melalui *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* pada Juli 2018, pemerintah Fiji kemudian mengeluarkan kebijakan nasional untuk menghadapi perubahan iklim pada Januari 2019 (*Republic of Fiji National Climate Change Policy*). Beberapa poin dalam kebijakan nasional Fiji yang linear dengan kesepakatan yang dihasilkan dari *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP), antara lain:

1. Strategi yang dibangun pemerintah Fiji untuk memanfaatkan platform nasional, regional, dan Internasional untuk menciptakan dan mempromosikan inisiatif untuk mengurangi polusi laut dan plastik, serta peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon biru.
2. Pemerintah Fiji dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy* mengakui dengan tegas adanya dampak antropogenik yang merugikan lautan akibat eksploitasi perikanan yang berlebihan, polusi laut, plastik, degradasi lahan, dan praktik pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan.
3. Pemerintah Fiji dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy* mengesahkan komitmennya terhadap Perjanjian Paris dalam hukum nasional. Yang selanjutnya menciptakan landasan hukum kuat untuk menghasilkan insentif ekonomi dan mekanisme penegakan hukum yang diperlukan untuk mengurangi

resiko perubahan iklim di seluruh negeri dan meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk adaptasi, transformasi, dan mitigasi dampak gas rumah kaca.

Selain dalam *Republic of Fiji National Climate Change Policy*, Fiji juga mengimplementasikan poin kesepakatan dari IPPP melalui *Blue Prosperity Programme* yang diresmikan pada 2021 dengan tujuan untuk keamanan laut, serta ketahanan ekonomi nasional Fiji. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi, Perikanan, dan Lingkungan Hidup Fiji bersama dengan Waitt Institut, sebagai upaya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program ini berbasis pada ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan konsultatif dengan masukan dari lembaga pemerintah, masyarakat sipil, pemangku kepentingan, LSM, pakar kelautan, dan individu. Program ini sejalan dengan komitmen yang dibangun Fiji dalam IPPP yaitu upaya untuk menciptakan keberlanjutan laut melalui peningkatan regulasi di bidang perikanan untuk mencegah penangkapan yang berlebih.

CONCLUSION

Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung kebijakan pemerintah Fiji dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan. Diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI melalui berbagai forum internasional, seperti IPU dan APPF, telah berhasil mendorong komitmen nasional Fiji terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

Fiji sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, menunjukkan respon yang positif terhadap diplomasi parlemen Indonesia. Kebijakan nasional Fiji yang dikeluarkan setelah pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) mencerminkan kesepakatan dan komitmen yang dibangun melalui diplomasi parlemen. Kebijakan tersebut termasuk strategi untuk mengurangi polusi laut, komitmen terhadap Perjanjian Paris, dan program Blue Prosperity yang fokus pada keberlanjutan laut dan ketahanan ekonomi.

Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi strategis yang dilakukan oleh parlemen Indonesia berhasil mendorong Fiji untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi isu lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya berperan dalam membangun hubungan antarnegara, tetapi juga efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Pada akhirnya, hasil analisis menunjukkan bahwa diplomasi parlemen Indonesia merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung upaya Fiji dalam menghadapi tantangan lingkungan. Kerjasama yang terjalin melalui diplomasi parlemen memperkuat komitmen regional terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keamanan lingkungan global.

REFERENCES

- Advertorial. (2017). INDONESIA DAN FIJI TEKEN MOU GRUP KERJA SAMA BILATERAL. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3633414/indonesia-dan-fiji-teken-mou-grup-kerja-sama-bilateral>
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2019). RETRIEVED FROM BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN: <https://ksap.dpr.go.id/index/index-gksb>
- BDF diselenggarakan di tengah kemunduran demokrasi. (n.d.). Retrieved from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/world/2022/12/09/bdf-convenes-amid-democratic-backsliding.html>
- Chair's Summary. (2018). INDONESIA – PACIFIC PARLIAMENTARY PARTNERSHIP ON HUMAN DEVELOPMENT AND MARITIME SUSTAINABILITY. Jakarta: BKSAP DPR RI.
- Anonim (2017). CLIMATE VULNERABILITY ASSESSMENT- MAKING FIJI CLIMATE RESILIENT. Washington, DC, : Government of Fiji, World Bank, and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery.
- Anonim (2021). FIJI LAUNCHES BLUE PROSPERITY PROGRAMME TO SECURE HEALTHY OCEANS & ECONOMIC RESILIENCE. Pasifika Environews.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). BALI DEMOCRACY FORUM. Retrieved from <https://bdf.kemlu.go.id>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). BALI DEMOCRACY FORUM. Retrieved from MENGAPA BDF Sejarah: <https://bdf.kemlu.go.id/why-bdf>
- Nainggolan, P. P. (2020). DIPLOMASI PARLEMEN. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim BKSAP DPR RI. (2009). DIPLOMASI DPR; Dari Senayan ke Kancan Global. Jakarta: Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.